



Original Article

Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Daerah di Indonesia: Analisis Efektivitas Era SBY dan Jokowi

Adli Gumilang Herdi^{1✉}, Debora Nurhary Grecia Marpaung², Diva Noviandani³, Muhammad Anugerah Ramadhan⁴, Veronica Uly Artha Situmorang⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Keuangan Negara STAN,

Jl. Bintaro Utama 5, Kelurahan Jurang Manggu Timur, Kecamatan Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten

Correspondence Author: 4132240066_adli@pknstan.ac.id[✉]

Abstract:

This study aims to analyze the impact of provincial government capital expenditure on regional economic growth in Indonesia, with a particular focus on the comparative effectiveness between the administrations of Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2014) and Joko Widodo (2014–2024). Using panel data from 34 provinces over the 2005–2024 period, this research employs panel regression with a fixed-effects specification and interaction tests between capital expenditure and government regimes. The results show that capital expenditure consistently exerts a positive and significant effect on regional economic growth. However, its effectiveness is found to be stronger during the Yudhoyono administration than during the Jokowi era, as indicated by a significant negative interaction coefficient in the latter period. Furthermore, the study identifies a structural shift in regional GDP levels between the two administrations and demonstrates the simultaneous significance of capital expenditure, government regime, and their interaction in influencing economic growth. The model explains 80.19% of the variation in regional GDP, while the remaining portion is driven by other factors such as private investment, international trade, and global economic conditions. These findings emphasize that although capital expenditure remains a vital instrument for fostering economic growth, its effectiveness largely depends on the quality of policy implementation and the surrounding political-fiscal context.

Keywords: *capital expenditure, economic growth, regional GDP, panel data, SBY, Jokowi*



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi selalu menjadi medan pertarungan utama dalam setiap masa pemerintahan. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan

akumulasi output nasional, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan fiskal dan politik pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat ([Todaro & Smith, 2020](#)). Dalam kerangka kebijakan fiskal, belanja modal pemerintah memainkan peran penting karena diarahkan untuk pembentukan aset tetap seperti infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas publik lainnya yang diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan konektivitas ekonomi regional ([Mankiw, 2016](#)).

Dengan struktur geografis yang luas dan kepadatan pembangunan yang timpang antardaerah, kebijakan belanja modal memainkan peran strategis dalam membuka keterisolasian wilayah, mendorong produktivitas lokal, dan menciptakan konektivitas nasional. Namun, efektivitas belanja modal sering kali berbeda antarwilayah maupun antarperiode pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh variasi kualitas perencanaan, implementasi anggaran, serta kapasitas kelembagaan daerah ([Syadullah & Setyawan, 2021](#)).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja modal memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan hasil dan fokus yang beragam. [Damanik et al. \(2023\)](#) meneliti Sumatera Utara dengan memasukkan variabel penduduk, tenaga kerja, dan investasi, dan menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan, sementara variabel lain cenderung tidak konsisten. Hasil serupa diperoleh oleh [Dwy & Iryani \(2022\)](#) di Kota Padang, yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif signifikan, namun tenaga kerja justru berdampak negatif. Penelitian [Rahmatullah et al. \(2022\)](#) di Makassar juga mendukung peran belanja modal, tetapi menemukan tenaga kerja tidak signifikan dan inflasi berpengaruh negatif, menandakan faktor makro lain turut menentukan dinamika pertumbuhan.

Untuk memahami peran belanja modal secara utuh, kita tidak bisa melepaskan diri dari perbandingan antar pemerintahan. Di Indonesia, dua periode pemerintahan terakhir menyajikan kontras yang sangat mencolok: pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) dan pemerintahan Joko Widodo (2014–2024). Keduanya mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam melihat dan mengeksekusi kebijakan belanja modal.

Pemerintahan SBY dikenal dengan pendekatan ekonominya yang konservatif dan berhati-hati. Fokus utama diarahkan pada penguatan fondasi makroekonomi pasca-krisis 1998, menekan defisit fiskal, menjaga inflasi, dan menjaga kredibilitas anggaran di mata lembaga internasional. Akibatnya, porsi belanja modal terhadap total belanja negara pada era SBY cenderung kecil, rata-rata hanya berkisar 10–13% ([Kementerian Keuangan RI, 2015](#)). Bahkan dalam beberapa tahun awal, proporsinya lebih rendah dari itu. Hal ini mencerminkan kecenderungan kehati-hatian dalam membelanjakan anggaran negara untuk proyek fisik, sekalipun kebutuhan infrastruktur sangat besar.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada masa SBY cukup impresif, dengan rerata mencapai 5,6% per tahun. Puncaknya terjadi pada 2007, dengan angka pertumbuhan 6,35% sebelum akhirnya mengalami penurunan imbas krisis global 2008 (BPS, 2015). Stabilitas nilai tukar, surplus neraca berjalan di awal dekade, serta pertumbuhan investasi asing menunjukkan bahwa pendekatan fiskal yang disiplin, meskipun minim ekspansi modal, tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketika Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan pada 2014, paradigma ekonomi negara mengalami pergeseran tajam. Belanja modal tidak lagi diperlakukan sebagai pengeluaran sekunder, melainkan sebagai pilar utama strategi pembangunan. Pemerintah menempatkan infrastruktur sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN 2015, porsi belanja modal mulai meningkat signifikan. Pada 2016, belanja modal menyentuh angka Rp 210 triliun, naik hampir dua kali lipat dari era sebelumnya. Proporsinya terhadap total belanja negara meningkat menjadi 15–18% (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Namun di balik lonjakan belanja tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stagnan pada kisaran 5% per tahun ([Bank Indonesia, 2020](#)). Bahkan sebelum pandemi COVID-19, angka pertumbuhan tidak pernah mencapai kembali 6%. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah belanja modal benar-benar efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia?

Meskipun telah banyak penelitian dilakukan mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil yang ditemukan kerap menunjukkan keragaman yang signifikan antar wilayah. Sebagai contoh, penelitian oleh [Maury G. \(2023\)](#) di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, studi oleh [Rahmatullah M. \(2022\)](#) di Kota Makassar menemukan bahwa belanja modal justru berpengaruh positif dan signifikan. Variasi temuan ini mencerminkan bahwa efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural, kesiapan kelembagaan, serta kualitas implementasi kebijakan di masing-masing daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya pada tingkat provinsi. Secara lebih rinci, penelitian ini berupaya: (1) menguji apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) provinsi di Indonesia; (2) menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat PDRB antara periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) setelah mengendalikan variabel belanja modal; (3) menilai signifikansi interaksi antara belanja modal dan rezim pemerintahan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi; (4) membandingkan efektivitas belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi melalui dua pendekatan yaitu pendekatan terpisah dan gabungan; (5) menguji pengaruh simultan belanja modal, rezim pemerintahan, serta interaksinya terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Indonesia; dan (6) mengevaluasi sejauh mana belanja modal, rezim pemerintahan, serta interaksinya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kedua periode pemerintahan tersebut. Analisis dilakukan menggunakan data panel belanja modal setiap provinsi pada era pemerintahan Presiden SBY dan Joko Widodo.

Penelitian ini menjadi sangat penting di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat peran fiskal dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Di tengah keterbatasan fiskal, tingginya beban utang, dan krisis kepercayaan publik terhadap belanja negara, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa dampak nyata.

Dalam konteks inilah, penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan mendesak. Kajian ini bukan hanya akan memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan masukan konkret bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih rasional, adil, dan produktif.

Landasan Teori

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan dan perkembangan

berkelanjutan dalam kondisi perekonomian suatu negara menuju kondisi yang lebih baik selama periode waktu tertentu ([Jati & Robertus, 2024](#)). Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami perkembangan apabila tingkat aktivitas ekonominya meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya ([Damanik, 2023](#)).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Klasifikasi berdasarkan fungsi digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan, klasifikasi berdasarkan organisasi digunakan untuk keperluan akuntabilitas, dan klasifikasi berdasarkan ekonomi digunakan untuk tujuan statistik dan obyek (jenis belanja), ketaatan (compliance), pengendalian (control), dan analisis ekonomi.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja lainnya/tak terduga. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja operasi mencakup pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin pemerintah pusat atau daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun belanja lainnya/tak terduga merujuk pada pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat luar biasa dan tidak diharapkan terulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Dalam Buletin Teknis SAP 03 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, suatu belanja dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran atas belanja tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut [Waryanto \(2017\)](#), belanja modal memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah investasi. Dalam konteks akuntansi, khususnya terkait belanja, istilah investasi muncul dari perbedaan antara revenue expenditure dan capital expenditure. Istilah yang tepat digunakan untuk belanja modal adalah capital expenditure, karena jenis pengeluaran ini memberikan manfaat yang melampaui satu periode akuntansi.

Teori Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menekankan pentingnya permintaan agregat dalam perekonomian, khususnya dalam jangka pendek dan menengah. Keynes berpendapat bahwa ekonomi tidak selalu mencapai keseimbangan secara otomatis, terutama saat terjadi resesi atau ketika permintaan swasta menurun. Dalam kondisi tersebut, pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja modal, dapat berperan penting dalam merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi ([Mankiw, 2003](#)). Salah satu bentuk belanja modal yang sering dianjurkan dalam teori Keynesian adalah investasi pada infrastruktur publik, yang diharapkan dapat meningkatkan output ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Secara matematis, teori Keynesian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Pada teori Keynesian, Y merupakan output nasional (PDB) yang dibentuk oleh

permintaan konsumsi rumah tangga (C), permintaan investasi dari sektor bisnis (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan pengeluaran luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M).

Dalam jangka menengah, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi, dapat meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dengan memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik dapat menurunkan biaya produksi dan distribusi barang, mempercepat mobilitas tenaga kerja dan barang, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada infrastruktur tersebut. Penelitian oleh [Syadullah dan Setyawan \(2021\)](#) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan dampak signifikan terutama pada investasi infrastruktur jalan. Studi ini menggunakan data panel dari 29 provinsi selama periode 2011–2018 dan menemukan bahwa investasi infrastruktur jalan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan efek yang mulai terlihat pada tahun keempat setelah pembangunan infrastruktur.

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur tidak hanya berperan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh efek pengganda yang timbul dari peningkatan aktivitas ekonomi. Setiap unit pengeluaran untuk proyek infrastruktur akan menghasilkan tambahan output yang lebih besar dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya merangsang permintaan agregat lebih lanjut ([Boediono, 1999](#)). Oleh karena itu, meskipun pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2005-2023 dapat dilihat dalam jangka menengah, dampak tersebut tetap penting dalam memulihkan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, terutama di saat kondisi perekonomian sedang tidak stabil.

Teori Keynesian ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan fiskal negara. Pengeluaran ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai stimulan ekonomi yang membantu meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara belanja modal pemerintah daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pendekatan kuantitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengukur besaran pengaruh antarvariabel secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik. Dengan menggunakan teknik ekonometrika, penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang teruji secara empiris dan dapat digeneralisasi, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga inferensial. Ruang lingkup penelitian mencakup 34 provinsi di Indonesia sepanjang periode 2005–2024, sehingga mampu menangkap variasi spasial antarwilayah dan dinamika temporal pembangunan ekonomi daerah lintas era pemerintahan.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk panel, yang menggabungkan dimensi waktu (*time series*) dan dimensi wilayah (*cross-section*). Data diperoleh dari sumber resmi pemerintah, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) untuk

variabel PDRB, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk variabel belanja modal daerah. Struktur data panel yang digunakan memungkinkan analisis dilakukan lebih komprehensif dibandingkan hanya menggunakan data deret waktu atau potong lintang, karena dapat menangkap heterogenitas antarprovinsi sekaligus dinamika antarperiode.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini disusun untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam pengukuran. Variabel dependen yang digunakan adalah PDRB harga berlaku provinsi yang ditransformasi dalam logaritma natural ($\ln$) untuk menjaga stabilitas varians ($\ln_PDRB$). Variabel independen utama adalah belanja modal pemerintah daerah provinsi ($\ln_BelanjaModal$). Selain itu, penelitian ini menggunakan dummy era pemerintahan (0 untuk SBY, 1 untuk Jokowi) sebagai variabel moderasi untuk menangkap perbedaan level PDRB antarera. Untuk melihat perbedaan efektivitas belanja modal lintas era, ditambahkan variabel interaksi antara belanja modal dan dummy era. Dengan konstruksi ini, model penelitian dapat mengukur baik pengaruh langsung belanja modal maupun variasinya antarperiode pemerintahan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengakses dan menghimpun data resmi yang dipublikasikan lembaga pemerintah terkait. Prosesnya meliputi identifikasi sumber data, pengunduhan publikasi BPS dan DJPK, serta kompilasi data per tahun dan per provinsi ke dalam format panel. Setelah itu dilakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian tahun anggaran dan menghindari duplikasi, sebelum akhirnya data disusun dalam perangkat lunak STATA Now 19 SE. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin integritas dan replikasi hasil penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan regresi data panel, yang mengombinasikan dimensi waktu dan wilayah sehingga lebih unggul dibanding regresi deret waktu atau potong lintang. Metode ini dipilih karena mampu mengatasi heterogenitas antarprovinsi dan menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama: (1) model terpisah per era pemerintahan (SBY dan Jokowi) untuk menilai karakteristik khusus masing-masing periode, serta (2) model gabungan dengan dummy era dan interaksi untuk menguji secara formal perbedaan pengaruh belanja modal antarperiode dalam satu kerangka regresi. Pendekatan ganda ini memungkinkan perbandingan substantif sekaligus pengujian statistik yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan belanja modal lintas era.

Dalam regresi data panel terdapat tiga spesifikasi utama, yakni *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model dilakukan secara bertahap melalui uji *Chow* untuk membandingkan PLS dengan FEM, uji *Hausman* untuk memilih antara FEM dan REM, serta uji *Lagrange Multiplier* (LM) *Breusch–Pagan* jika FEM tidak lebih baik daripada PLS. Prosedur ini penting untuk memastikan model yang dipilih sesuai dengan struktur data serta karakteristik variabel, sehingga estimasi yang dihasilkan dapat diandalkan. Mengingat penelitian ini menggunakan data lintas provinsi dalam jangka panjang, FEM lebih berpeluang dipilih karena mampu mengendalikan heterogenitas tetap antarwilayah yang mungkin berpengaruh terhadap PDRB. Pelaksanaan pemilihan model dilakukan menggunakan perangkat lunak STATA Now 19 SE, yang menyediakan fasilitas uji formal secara otomatis. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk memilih model estimasi akhir sebelum memasuki tahap uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pemilihan model yang tepat menjadi fondasi metodologis agar hasil penelitian valid.

Sebelum menguji hipotesis, model regresi panel terlebih dahulu diuji asumsi klasik untuk memastikan hasil estimasi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji normalitas menggunakan *Jarque–Bera test* dilakukan untuk menilai distribusi residual, berdasarkan *Central Limit Theorem* dengan jumlah observasi besar pengaruhnya relatif kecil. Uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) memastikan tidak terjadi korelasi berlebih antarvariabel independen. Heteroskedastisitas diuji dengan *Modified Wald Test* atau *Breusch–Pagan Test*, sementara autokorelasi diperiksa melalui *Wooldridge Test* atau dengan memperhatikan ρ pada hasil estimasi menggunakan *xtregar*. Selain itu, Pesaran CD Test digunakan untuk mendeteksi *cross-sectional dependence* yang sering muncul dalam data panel lintas wilayah. Jika ditemukan pelanggaran asumsi, digunakan koreksi *Driscoll–Kraay standard errors* agar hasil estimasi tetap valid dan andal.

Setelah model memenuhi atau dikoreksi terhadap asumsi klasik, uji hipotesis dilakukan untuk menilai signifikansi pengaruh variabel independen. Uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial belanja modal, dummy era, dan interaksinya terhadap PDRB. Uji F digunakan untuk menilai pengaruh simultan seluruh variabel independen, sehingga memastikan model signifikan secara keseluruhan. Sementara itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya variasi PDRB yang mampu dijelaskan oleh variabel dalam model. Dalam konteks panel data, interpretasi terutama difokuskan pada within R^2 karena lebih merepresentasikan variasi dalam provinsi sepanjang periode penelitian. Pelaksanaan seluruh uji dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% menggunakan STATA Now 19 SE. Hasil uji t, F, dan R^2 kemudian menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana pengaruh belanja modal terhadap PDRB antar era pemerintahan. Dengan demikian, uji asumsi klasik menjamin kelayakan model, sementara uji hipotesis memberikan bukti empiris terkait pengaruh belanja modal terhadap PDRB serta perbedaan efektivitasnya antar era pemerintahan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Perekonomian Indonesia

Selama dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia menunjukkan dinamika positif dengan konsumsi, investasi, dan ekspor sebagai penopang utama. Pada kuartal IV 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,02% (YoY) dan 0,53% (QoQ), menegaskan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Pemulihan pascapandemi 2020 berjalan solid, didorong konsumsi domestik dan investasi, sementara stabilitas makroekonomi tetap terjaga melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 sebagian besar ditopang oleh belanja modal, khususnya infrastruktur, yang mencapai Rp245,2 triliun atau tumbuh 29,6% (YoY). Anggaran difokuskan pada proyek strategis seperti jalan tol Trans-Sumatra dan Trans-Papua serta pembangkit listrik 35.000 MW, yang diharapkan meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan memenuhi kebutuhan energi industri dan rumah tangga. Proyeksi Bank Indonesia untuk 2025 menunjukkan pertumbuhan sekitar 5,1%, didorong belanja modal efisien pada infrastruktur, energi terbarukan, dan investasi digital/manufaktur, dengan fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variable	N	Min	Max	Median	Mean	Standar Deviasi	Variance
<i>ln_PDRB</i>	640	7,8567	14,9687	11,7187	11,7011	1,3631	1,8580
<i>ln_BelanjaModal</i>	640	2,1834	8,6438	6,4862	6,3878	0,9327	0,8700
<i>DummyEra</i>	640	0	1	0,5	0,5	0,5004	0,2504
<i>lnBelanjaModal_DummyEra</i>	640	0	8,6438	2,5862	3,4255	3,4593	11,9670

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik utama variabel penelitian. Data *ln_PDRB* dan *ln_BelanjaModal* memperlihatkan variasi yang cukup besar antarprovinsi, baik dalam capaian ekonomi maupun alokasi belanja modal. Variabel *DummyEra* seimbang antara periode SBY dan Jokowi, sehingga perbandingan antar era dapat dilakukan secara proporsional. Adapun variabel interaksi *lnBelanjaModal_DummyEra* menegaskan adanya heterogenitas intensitas belanja modal pada era Jokowi.

Secara umum, statistik deskriptif ini menegaskan adanya disparitas antarwilayah dan menyediakan dasar yang kuat untuk menguji efektivitas belanja modal terhadap PDRB pada kedua periode pemerintahan.

Hasil Estimasi Model Data Panel

Pendekatan Model Terpisah per Era Pemerintahan

Pemilihan Model Panel

Tabel 2. Pemilihan Model Panel untuk Masing-Masing Era

Uji	Hipotesis	Statistik	p-value	Keputusan	Implikasi Model
Era SBY					
<i>Chow</i>	<i>Pooled vs FE</i>	$\chi^2(31)=1549,70$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>LM Breusch-Pagan</i>	<i>Pooled vs RE</i>	$\chi^2(01)=839,10$	0,0000	Tolak Ho	Model RE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>Hausman</i>	<i>FE vs RE</i>	$\chi^2(1) = 44,69$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan RE
Era JOKOWI					

<i>Chow</i>	<i>Pooled FE</i>	<i>vs</i>	$chi2(31) = 3467,17$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>LM Breusch–Pagan</i>	<i>Pooled RE</i>	<i>vs</i>	$chibar2(01)=819,45$	0,0000	Tolak Ho	Model RE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>Hausman</i>	<i>FE vs RE</i>		$chi2(1) = 19,25$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan RE

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Uji spesifikasi (*Chow*, *LM Breusch–Pagan*, dan *Hausman*) pada kedua era menunjukkan hasil konsisten: model *Fixed Effects* (FE) lebih tepat dibandingkan *Pooled OLS* maupun *Random Effects*. Dengan demikian, estimasi regresi untuk era SBY maupun Jokowi dilakukan menggunakan model FE.

Pemilihan ini sesuai dengan karakteristik data panel lintas provinsi, di mana terdapat heterogenitas tetap antarwilayah yang dapat memengaruhi PDRB. Model FE memungkinkan pengendalian faktor tersebut sehingga estimasi hubungan antara belanja modal dan PDRB lebih andal.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik Era SBY

Uji	Statistik	<i>p-value</i>	Keputusan	Implikasi
Normalitas (<i>Jarque–Bera test / sktest</i>)	$Adj\ chi2(2) = 4,86$	0,0879	Gagal Tolak Ho	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas (<i>Variance Inflation Factor / VIF</i>)	$Mean\ VIF = 1$	-	Tidak bermasalah ($VIF < 10$)	Tidak terdapat multikolinearitas
Heteroskedastisitas (<i>Modified Wald / xttest3</i>)	$chi2(32) = 514,79$	0,0000	Tolak Ho	Terdapat heteroskedastisitas
Autokorelasi (<i>xtregar</i>)	$\rho_ar = 0,90335$	-	Autokorelasi (ρ_ar mendekati 1)	Terdapat autokorelasi
Cross-sectional dependence (Pesaran)	$\ln_PDRB=69,66;$ $\ln_BelanjaModal = 49,68$	$\ln_PDRB=$ $0,0000$ $\ln_Bela$	Tolak Ho	Terdapat cross-sectional dependence

CD / <i>xtcd</i>)	<i>njaMod</i> <i>al</i> = <i>0,0000</i>
--------------------	---

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik Era Jokowi

Uji	Statistik	<i>p-value</i>	Keputusan	Implikasi
Normalitas (<i>Jarque-Bera test / sktest</i>)	<i>Adj</i> <i>chi2(2) =</i> <i>3,61</i>	<i>0,1641</i>	Gagal Tolak Ho	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas (<i>Variance Inflation Factor / VIF</i>)	<i>Mean</i> <i>VIF = 1</i>	-	Tidak bermasalah (<i>VIF<10</i>)	Tidak terdapat multikolinearitas
Heteroskedastisitas (<i>Modified Wald / xttest3</i>)	<i>chi2(32)</i> <i>= 136,82</i>	<i>0,0000</i>	Tolak Ho	Terdapat heteroskedastisitas
Autokorelasi (<i>xtregar</i>)	<i>rho_ar =</i> <i>0,88123</i>	-	Autokorelasi (<i>rho_ar</i> mendekati 1)	Terdapat autokorelasi
Cross-sectional dependence (Pesaran CD / <i>xtcd</i>)	<i>ln_PDR</i> <i>B=60,36</i> ; <i>ln_BelanjaModal</i> <i>=6,87</i>	<i>ln_PDRB=</i> <i>0,0000</i> <i>ln_BelanjaModal =</i> <i>0,0000</i>	Tolak Ho	Terdapat cross-sectional dependence

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Pengujian asumsi klasik pada kedua era menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinearitas. Namun, uji *Wald*, autokorelasi, dan *cross-sectional dependence* sama-sama menolak hipotesis nol, menandakan adanya heteroskedastisitas, autokorelasi, dan ketergantungan lintas provinsi.

Kondisi ini berimplikasi bahwa metode estimasi konvensional berpotensi menghasilkan *standard error* yang bias. Untuk itu, penelitian ini menggunakan *Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)* yang *robust* terhadap ketiga permasalahan tersebut, sehingga estimasi tetap konsisten dan reliabel pada data panel lintas provinsi.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Estimasi Era SBY

Variabel	Koefisien	<i>Std. Error</i> (<i>Drisc/Kraay</i>)	<i>t</i>	<i>p-value</i>	<i>Prob > F</i>	<i>Within R-squared</i>
----------	-----------	---	----------	----------------	--------------------	-------------------------

<i>ln_BelanjaModal</i>	0,6345	0,1229	5,16	0,001	0,0006	0,5132
<i>_cons</i>	7,3315	0,6091	12,04	0,000		

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Tabel 6. Hasil Estimasi Era JOKOWI

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Std. Error</i> (<i>Drisc/Kraay</i>)	<i>t</i>	<i>p-value</i>	<i>Prob</i> > <i>F</i>	<i>Within</i> <i>R-squared</i>
<i>ln_BelanjaModal</i>	0,1555	0,0521	2,99	0,015	0,015	0,0453
<i>_cons</i>	11,2458	0,3935	28,58	0,000	3	

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Hasil estimasi *Fixed Effects* dengan koreksi *Driscoll–Kraay* menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB pada kedua era. Namun, pengaruhnya jauh lebih kuat pada era SBY dibandingkan JOKOWI.

Pada era SBY, variasi belanja modal mampu menjelaskan lebih dari separuh variasi PDRB antarprovinsi, mencerminkan efektivitas tinggi belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pada era JOKOWI kontribusinya relatif kecil, dengan R^2 yang rendah, sehingga peran faktor lain di luar belanja modal lebih dominan dalam menentukan kinerja ekonomi daerah.

Dengan demikian, meskipun belanja modal konsisten berdampak positif, efektivitasnya menurun signifikan pada era JOKOWI, menandakan adanya perbedaan struktur maupun efektivitas kebijakan fiskal antarperiode pemerintahan.

Pendekatan Model Gabungan dengan DummyEra dan Interaksi Pemilihan Model

Tabel 7. Pemilihan Model Panel untuk Model Gabungan dengan *DummyEra* dan Interaksi

Uji	Hipotesis	Statistik	<i>p-value</i>	Keputusan	Implikasi Model
Model 1					
<i>Chow</i>	<i>Pooled vs FE</i>	$chi2(31) = 1752,91$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>LM Breusch–Pagan</i>	<i>Pooled vs RE</i>	$chibar2(01) = 2859,95$	0,0000	Tolak Ho	Model RE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>Hausman</i>	<i>FE vs RE</i>	$chi2(1) = 22,07$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan RE
Model 2					
<i>Chow</i>	<i>Pooled vs FE</i>	$chi2(31) = 3327,85$	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan

						<i>Pooled OLS</i>
<i>LM Breusch–Pagan</i>	<i>Pooled RE</i>	<i>vs</i>	<i>chibar2(01) = 3170,37</i>	0,0000	Tolak Ho	Model RE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>Hausman</i>	<i>FE vs RE</i>		<i>chi2(1) = 25,02</i>	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan RE
Model 3						
<i>Chow</i>	<i>Pooled FE</i>	<i>vs</i>	<i>chi2(31) = 3708,26</i>	0,0000	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>LM Breusch–Pagan</i>	<i>Pooled RE</i>	<i>vs</i>	<i>chibar2(01) = 3095,07</i>	0,0000	Tolak Ho	Model RE lebih tepat dibandingkan <i>Pooled OLS</i>
<i>Hausman</i>	<i>FE vs RE</i>		<i>chi2(1) = 22,31</i>	0,0001	Tolak Ho	Model FE lebih tepat dibandingkan RE

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Pengujian spesifikasi pada ketiga model gabungan (dengan variabel utama, tambahan dummy era, serta interaksi) menunjukkan hasil konsisten: *Fixed Effects* (FE) lebih tepat dibandingkan *Pooled OLS* maupun *Random Effects*.

Pemilihan FE relevan karena data panel lintas provinsi memiliki heterogenitas tetap yang signifikan. Dengan FE, analisis dapat mengendalikan faktor-faktor spesifik provinsi sekaligus mengakomodasi perbedaan antar era pemerintahan. Hal ini menjadikan model gabungan berbasis FE lebih andal dan komprehensif untuk menilai efektivitas belanja modal terhadap PDRB antarperiode.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Uji Asumsi Klasik 3 Model

Uji	Mode l	Statistik	p-value	Keputusan	Implikasi & Tindakan
Normalitas (Jarque–Bera test / sktest)	1	<i>Adj chi2(2) = 10,78</i>	0,0046	Tolak Ho	Residual tidak berdistribusi normal → Berdasarkan <i>central limit theorem</i> , dengan jumlah observasi besar (N=640) distribusi rata-rata residual akan mendekati distribusi normal dan secara visual (<i>histogram</i>) data tampak terdistribusi normal
	2	<i>Adj chi2(2) = 4,76</i>	0,0926	Gagal Tolak Ho	Residual berdistribusi normal → asumsi normalitas terpenuhi
	3	<i>Adj</i>	0,1121	Gagal Tolak	Residual berdistribusi

		$chi2(2) = 4,38$		Ho	normal → asumsi normalitas terpenuhi
Multikolineritas (Variance Inflation Factor / VIF)	1	Mean VIF = 1	-	Tidak bermasalah (VIF<10)	Tidak terdapat multikolinearitas
	2	Mean VIF=1,33	-	Tidak bermasalah (VIF<10)	Tidak terdapat multikolinearitas
	3	Mean VIF = 53,56	-	VIF>10, interaksi variabel wajar menghasilkan korelasi tinggi,	Gunakan <i>robust standard error</i>
Heteroskedastisitas (Modified Wald / <i>xttest3</i>)	1	$chi2(32) = 481,16$	0,0000	Tolak Ho	Terdapat heteroskedastisitas <i>groupwise</i> → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>
	2	$chi2(32) = 187,15$	0,0000	Tolak Ho	Terdapat heteroskedastisitas <i>groupwise</i> → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>
	3	$chi2(32) = 217,85$	0,0000	Tolak Ho	Terdapat heteroskedastisitas <i>groupwise</i> → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>
Autokorelasi (<i>xtregar</i>)	1	$\rho_{ar}=0,9715$	-	Autokorelasi (ρ_{ar} mendekati 1)	Terdapat autokorelasi → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>
	2	$\rho_{ar}=0,9683$	-	Autokorelasi (ρ_{ar} mendekati 1)	Terdapat autokorelasi → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>
	3	$\rho_{ar}=0,9669$	-	Autokorelasi (ρ_{ar} mendekati 1)	Terdapat autokorelasi → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>
Cross-sectional dependence (Pesaran CD / <i>xtcd</i>)	1	$\ln_PDRB = 97,49$ $\ln_BelanjaModal = 70,75$	$\ln_PDRB = 0,0000$ $\ln_BelanjaM$	Tolak Ho	Terdapat <i>cross-sectional dependence</i> → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors (xtscc)</i>

odal=				
0,0000				
2	ln_PDRB =97,49 ln_Belanj aModal= 70,75 dummyer a =99,60	ln_PD RB =0,000 o ln_Bel anjaM odal=0 ,0000 dumm yera =0,000 o	Tolak Ho	Terdapat <i>cross-sectional dependence</i> → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors</i> (xtscc)
3	ln_PDRB =97,49 ln_Belanj aModal=7 0,75 dummyer a =99,60 lnBelanja Modal_D ummyEra =99,23	ln_PD RB =0,000 o ln_Bel anjaM odal=0 ,0000 dumm yera =0,000 o lnBela njaMo dal_Du mmyE ra =0,000 o	Tolak Ho	Terdapat <i>cross-sectional dependence</i> → gunakan <i>Driscoll–Kraay standard errors</i> (xtscc)

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Uji asumsi klasik pada tiga model gabungan menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, normalitas residual hanya tidak terpenuhi pada model pertama, sementara model lain memenuhi. Namun, Berdasarkan *central limit theorem*, dengan jumlah observasi besar, isu ini tidak berdampak serius karena estimator tetap konsisten. Kedua, multikolinearitas tidak bermasalah pada model 1 dan 2, sementara pada model 3 nilai VIF tinggi disebabkan adanya variabel interaksi. Kondisi ini wajar dan tidak mengganggu validitas estimasi.

Selanjutnya, seluruh model mengindikasikan adanya heteroskedastisitas, autokorelasi, dan *cross-sectional dependence*, yang lazim terjadi pada data panel lintas wilayah dan waktu. Untuk mengatasi hal ini, digunakan *Driscoll–Kraay standard errors*

yang *robust* terhadap ketiga permasalahan tersebut. Dengan koreksi ini, hasil estimasi tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uji Hipotesis

Model	Variabel	Koefisien	Std, Error (Drisc/Kraay)	t	p- value	Prob > F	Within R- squared
1	<i>ln_BelanjaModal</i>	0,8584	0,0526	16,31	0,0000	0,0000	0,6407
	<i>_cons</i>	6,2178	0,3664	16,97	0,0000		
2	<i>ln_BelanjaModal</i>	0,4894	0,1063	4,60	0,000	0,0000	0,7880
	<i>DummyEra</i>	0,7673	0,2670	2,87	0,010		
	<i>_cons</i>	8,1913	0,5374	15,24	0,000		
3	<i>ln_BelanjaModal</i>	0,5391	0,09465	5,70	0,0000	0,0000	0,8076
	<i>DummyEra</i>	2,7480	0,3896	7,05	0,0000		
	<i>lnBelanjaModal_</i>	-0,2958	0,0283	-	0,0000		
	<i>DummyEra</i>			10,45			
	<i>_cons</i>	7,8970	0,4466	17,68	0,0000		

Sumber: data diolah menggunakan StataNow 19 SE

Tabel 9. Hasil Estimasi Model Gabungan dengan *Dummy* Interaksi

Hasil uji hipotesis dengan metode *Fixed Effects* dan koreksi *Driscoll–Kraay* menunjukkan bahwa belanja modal secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di seluruh model.

- Model 1: belanja modal meningkatkan PDRB sebesar 0,86% untuk setiap kenaikan 1% ($R^2 = 0,6407$).
- Model 2: setelah mempertimbangkan perbedaan era, efek belanja modal menurun menjadi 0,49%, namun terdapat perbedaan level PDRB signifikan antarera (era JOKOWI lebih tinggi). Daya jelaskan model meningkat ($R^2 = 0,7880$).
- Model 3: menambahkan interaksi memperlihatkan bahwa meskipun belanja modal tetap positif (0,54%), efektivitasnya berkurang signifikan pada era JOKOWI (koefisien interaksi $-0,296$). Model ini memberikan daya jelaskan terbaik ($R^2 = 0,8076$).

Dengan demikian, hipotesis utama terkonfirmasi: belanja modal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaruhnya berbeda antarera pemerintahan. Model interaksi (Model 3) dinilai paling tepat karena menangkap perbedaan temporal sekaligus meningkatkan ketepatan estimasi.

Interpretasi Hasil dan Perbandingan Kedua Pendekatan

Pendekatan 1: Model Terpisah per Era Pemerintahan

Model	$\ln_PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 \ln_BelanjaModal_{it} + \varepsilon_{it}$
Model SBY	$\ln_PDRB_{it} = 7,3315 + 0,6345(\ln_BelanjaModal_{it}) + \varepsilon_{it}$
Model JOKOWI	$\ln_PDRB_{it} = 11,2458 + 0,1555(\ln_BelanjaModal_{it}) + \varepsilon_{it}$

Pendekatan 2: Model Gabungan dengan *DummyEra* dan Interaksi

Model	$\ln_PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 \ln_BelanjaModal_{it} + \beta_2 DummyEra_t + \beta_3 (\ln_BelanjaModal_{it} \times DummyEra_t) + \varepsilon_{it}$
Model Umum	$\ln_PDRB_{it} = 7,8970 + 0,5391(\ln_BelanjaModal_{it}) + 2,7480(DummyEra_t) - 0,2958(\ln_BelanjaModal_{it} \times DummyEra_t) + \varepsilon_{it}$
Model SBY ($D_t = 0$)	$\ln_PDRB_{it} = 7,9870 + 0,5391(\ln_BelanjaModal_{it}) + \varepsilon_{it}$
Model JOKOWI ($D_t = 1$)	$\ln_PDRB_{it} = 10,6450 + 0,2433(\ln_BelanjaModal_{it}) + \varepsilon_{it}$

Pendekatan terpisah menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada kedua era, namun elastisitas PDRB terhadap belanja modal lebih tinggi pada era SBY. Artinya, tambahan belanja modal lebih produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tersebut. Sebaliknya, pada era JOKOWI pengaruhnya menurun, meskipun *baseline* PDRB lebih tinggi, yang menandakan adanya *diminishing return* terhadap belanja modal.

Pendekatan gabungan dengan dummy interaksi mengonfirmasi temuan tersebut. Koefisien interaksi bernilai negatif signifikan, yang berarti pengaruh belanja modal pada era JOKOWI memang lebih rendah dibandingkan era SBY. Sementara itu, dummy era positif signifikan, mencerminkan level PDRB rata-rata lebih tinggi pada era JOKOWI.

Secara keseluruhan, kedua pendekatan menyajikan hasil konsisten: meskipun belanja modal tetap menjadi instrumen penting pembangunan daerah, efektivitasnya menurun pada era JOKOWI. Penurunan ini dapat dipahami melalui tiga kemungkinan: (i) efisiensi alokasi dan kualitas implementasi proyek yang tidak optimal, (ii) peran faktor eksternal seperti konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan kondisi global yang lebih dominan, serta (iii) efek *diminishing return* akibat infrastruktur dasar yang telah banyak terbangun sejak era sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun belanja modal tetap signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, elastisitasnya pada era JOKOWI lebih rendah dibandingkan era SBY.

Simpulan

Penelitian ini menelaah pengaruh belanja modal pemerintah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan membandingkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sejalan dengan teori pembangunan yang menekankan pentingnya investasi publik. Namun, terdapat perbedaan efektivitas antar rezim: belanja modal pada era SBY terbukti lebih mampu mendorong pertumbuhan dibandingkan era Jokowi, yang ditunjukkan dengan koefisien lebih rendah bahkan cenderung negatif pada interaksi belanja modal.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan tingkat PDRB antara kedua periode pemerintahan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan, investasi, maupun dinamika global. Uji simultan menegaskan bahwa belanja modal, rezim pemerintahan, dan interaksi keduanya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga efektivitas kebijakan fiskal sangat

ditentukan oleh konteks politik dan tata kelola. Model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 80 persen variasi pertumbuhan ekonomi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia terbukti tidak hanya bergantung pada besaran belanja modal, tetapi juga pada kualitas tata kelola, stabilitas politik, dan sinergi faktor ekonomi lainnya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu menekankan kualitas belanja modal, bukan hanya besarnya alokasi, agar benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan tata kelola, kapasitas birokrasi, dan mekanisme evaluasi kinerja menjadi kunci agar belanja modal lebih efektif. Selain itu, kebijakan fiskal harus adaptif terhadap konteks politik, ekonomi, dan dinamika global, serta disinergikan dengan faktor non-fiskal seperti investasi swasta dan perdagangan. Mengingat keterbatasan anggaran, diversifikasi sumber pembiayaan melalui skema kerja sama pemerintah-swasta dan investasi asing juga perlu dioptimalkan untuk memperluas kapasitas pembangunan tanpa membebani fiskal.

References

- Badan Pusat Statistik. (2015, 5 Februari). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014 tumbuh 5,02 Persen, melambat sejak lima tahun terakhir. Siaran Pers.
- Bank Indonesia. (2025, 22 Januari). Laporan Perekonomian Indonesia 2024. Laporan Tahunan Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020, 16 September). Laporan Perekonomian Indonesia 2020. Laporan Tahunan Bank Indonesia.
- Damanik, D., Panjaitan, P. D., & Siallagan, S. S. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal KAFEBIS*, 1(1), 36-48.
- Jati, S., & Robertus, M. H. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2010-2020. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(3), 187–201.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016, 18 Februari). Realisasi APBN per 31 Desember 2015. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diakses dari portal resmi DJPb.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Perpustakaan Bappenas.
- Mankiw, N. Gregory. (2016). *Principles of Economics (8th ed.)*. Harvard University: Cengage Learning.
- Syadullah, M., & Setyawan, D. (2021). *Capital Expenditure and Economic Growth in Indonesia: Panel Evidence of Provincial Data*.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. United Kingdom: Pearson.